



Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
PELABAB BUPATI PRINGSEWU



RINGKASAN LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin kami haturkan kehadiran Allah SWT atas Berkah, Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Dengan adanya dukungan semua pihak dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian penyusunan informasi ini. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan RLPPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 ini adalah bentuk kewajiban kami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 Ayat(1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 mencakup gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu secara ringkas sepanjang Tahun 2023, dalam rangka pencapaian sasaran capaian kinerja makro, capaian kinerja pemerintahan wajib pelayanan dasar, hasil EPPD tahun sebelumnya, opini atas laporan keuangan dan ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih dengan harapan semoga segala daya dan upaya kita ini adalah dalam rangka ikut membangun Bumi Jejama Secancangan Kabupaten Pringsewu Bersahaja (berdaya saing, harmonis dan sejahtera) dan Provinsi Lampung Berjaya (berbudaya maju dan berdaya saing serta sejahtera).

Wallahul muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pringsewu, 25 Maret 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T.,M.M.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Penjelasan umum	1
1.2	• Undang-undang pembentukan daerah	2
	• Data geografis	3
	• Jumlah Penduduk	10
	• Jumlah Kecamatan dan desa	12
	• Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	15
Bab II	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20
2.1	Capaian Kinerja Makro/ IKK Makro	21
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan wajib/ IKK Outcome	22
	• Pendidikan	23
	• Kesehatan	25
	• Pekerjaan Umum	27
	• Perumahan Rakyat	28
	• Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30
	• Sosial	
2.3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan /IKK Output	45
Bab III	3.1 Hasil EPPD Tahun sebelumnya	65
	3.2 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya	73
	3.3 Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah	90
Bab IV	Inovasi Daerah	95
Bab V	Penutup	112



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan 2 dan Pasal 71 (LKPJ). Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



- Indonesia tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2043;
 10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiuh) bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (47 km dari pusat Kota ke arah selatan saat ini). Kemudian 187 tahun berikutnya, pada tahun 1925, sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh



pemerintah Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu. Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, yakni yang sekarang dikenal sebagai 'Pringsewu' yang saat ini juga merupakan salah satu Kabupaten yang cukup maju di Provinsi Lampung.

Dasar Hukum pembentukan Kabupaten Pringsewu adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932).

B. Data Geografis Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah

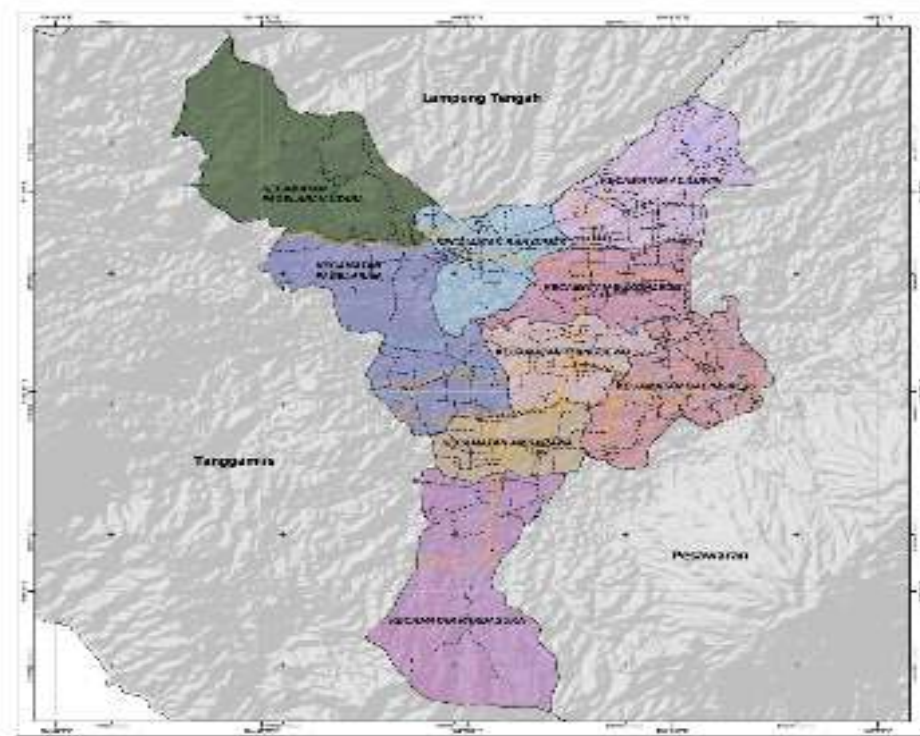
Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara $104^{\circ}45'25''$ - $105^{\circ}8'42''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}8'10''$ - $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan, yang mencakup wilayah daratan seluas 625 km² dengan batas wilayah meliputi :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar.1.1 dibawah ini :



Gambar. 1.1
Peta Administrasi Pringsewu



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Menurut administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi kedalam 9 (sembilan) kecamatanyang terdiri dari 126 (seratus dua puluh enam) Pekon dan 5 (lima) Kelurahan dengan rincian seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.



Tabel.1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jumlah Pekon/ Kelurahan	Luas (km ²)	Prosen
1	Pardasuka	13	87,31	14,15 %
2	Ambarawa	8	33,11	5,36 %
3	Pagelaran	22	48,42	7,85 %
4	Pringsewu	15	45,28	7,33 %
5	Gadingrejo	23	67,79	10,98 %
6	Sukoharjo	16	65,59	10,63 %
7	Banyumas	11	42,71	6,92 %
8	Adiluwih	13	68,80	11,15 %
9	Pagelaran Utara	10	158,19	25,63 %
	Jumlah	131	617,20	100,00 %

Sumber : Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2023

a. Topografi

1. Kemiringan lahan

Dari hasil perhitungan penggunaan metode interpolasi dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Pringsewu merupakan lahan datar yang memiliki tingkat keterenggan 0-8% seluas 26.123,61 Ha atau 41,79%. Lahan datar ini mencakup wilayah Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Sedangkan untuk lahan berbukit terjal yang memiliki tingkat keterenggan diatas 25% seluas 13.436,10 Ha atau 21,49% terdapat di Kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Dengan kondisi tingkat keterenggan yang demikian, maka Kabupaten Pringsewu sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan besar atau perindustrian menengah. Perincian kemiringan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:



Tabel.1.2
Luas Tingkat Kelerengan Lahan di Kabupaten Pringsewu

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Prosentase
1	0 – 3 %	10.738,10	17,17
2	3 – 8 %	15.385,51	24,61
3	8 – 15 %	11.933,15	19,09
4	15 – 25 %	11.017,14	17,63
5	25 – 40 %	2.003,29	3,20
6	Diatas 40 %	11.432,81	18,29
Jumlah		62.510,00	100,00

Sumber :Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2023

2. Ketinggian Lahan

Berdasarkan hasil interpretasi data *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM), maka elevansi lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0 – 100 meter dpl, 100 – 200 meter dpl, 200 – 300 dpl, 300 – 400 meter dpl, dan diatas 400 meter dpl. Elevansi lahan untuk kelas 0 – 100 meter hampir keseluruhan berada di setiap kecamatan kecuali Banyumas. Untuk mengetahui sebaran elevansi di wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan lokasi kecamatan, dapat dilihat pada Tabel1.3berikut ini.



Tabel.1.3
Tingkat Ketinggian Lahan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Luas Elevansi (m dpl) per Kecamatan				Jumlah (Ha)	%
		0 – 100	100 – 200	200 - 300	300 - 400		
1	Pardasuka	609,45	3.894,15	1.221,33	1.108,68	9.474	15,16
2	Ambarawa	739,94	2.359,06	0	0	3.099	4,96
3	Pagelaran	1.497,28	8.047,96	3.422,11	3.200,93	17.275	27,64
4	Pringsewu	1.452,82	3.876,18	0	0	5.329	8,53
5	Gading Rejo	1.768,40	6.802,60	0	0	8.571	13,71
6	Sukoharjo	578,81	6.716,19	0	0	7.295	11,67
7	Banyumas	0	3.673,65	311,35	0	3.985	6,38
8	Adiluwih	2.296,54	5.185,46	0	0	7.482	11,97
Jumlah		8.943,23	40.555,25	4.954,79	3.747,12	62.510	100,00
Prosentase		14,31	64,88	7,93	5,99	100	

Sumber :Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2023

3. Hidrologi

Seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terletak dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung. Dari cabang-cabang Daerah Aliran Sungai Way Sekampung tersebut, kemudian terbentuk anak Daerah Aliran Sungai Way Sekampung atau Sub DAS yang berfungsi mengalirkan air ke sungai utama (Way Sekampung) sebagaimana tertera pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel.1.4
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pringsewu

No	Daerah Aliran Sungai	Luas (Ha)	Prosen
1	Sub DAS Way Sekampung Anak	12.575,90	20,12
2	Sub DAS Way Bulok	15.144,96	24,23
3	Sub DAS Way Semah	2.209,20	3,53
4	Sub DAS Way Merabung Ilahan Suka	20.081,02	32,12
5	Sub DAS Way Tebu	12.498,92	20,00

Sumber :BPN Provinsi Lampung Tahun 2022

Kabupaten Pringsewu memiliki 7 aliran sungai yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber air bersih, irigasi pertanian, perikanan, maupun



sebagai sumber bahan bangunan (batu dan pasir). Aliran Sungai yang terpanjang adalah Way Sekampung dengan panjang 24 Km. Data aliran sungai di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel.1.5
Panjang Aliran Sungai di Kabupaten Pringsewu

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Daerah Aliran (km ²)
1	Way Sekampung	24,00	600
2	Way Gading	7,00	56
3	Way Apus	6,80	5.440
4	Way kriyo	8,80	7.040
5	Way Wayah	19,00	380
6	Way Langsep	17,00	225

Sumber :BPN Provinsi Lampung Tahun 2022

4. Karakteristik Wilayah

Kawasan di Kabupaten Pringsewu secara umum masih merupakan kawasan pertanian (lahan sawah dan lahan bukan sawah), yaitu sekitar 73,24% dimana luasan lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Gadingrejo, luasan lahan kebun terbesar berada di Kecamatan Pagelaran dan luasan lahan tegalan terbesar berada di Kecamatan Adiluwih sebagaimana Tabel 1.6 dibawah ini.

Tabel.1.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pringsewu

No	Penggunaan Lahan	Luas(Ha)
A	Lahan Pertanian	45.778
1	Lahan Sawah	
	• Irigasi Teknis	8.676
	• Tadah Hujan	4.852
	• Pasang Surut	-
	• Lebak	-
	• Lainnya	-
	Jumlah Lahan Sawah	13.528
2	Lahan Bukan Sawah	
	• Tegalan/ Kebun	14.133



No	Penggunaan Lahan	Luas(Ha)
	• Ladang/ Huma	-
	• Perkebunan	6.625
	• Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	2.012
	• Tambak	-
	• Kolam/ Tambak/ Empang	-
	• Lebak	-
	• Sementara Tidak Diusahakan	3.737
	• Lainnya (Pekarangan yang ditanami Pertanian dll)	5.743
	Jumlah Lahan bukan Sawah	32.250
B	Lahan Bukan Pertanian	16.722
	Jumlah Lahan bukan Pertanian	16.722
	Jumlah	62.500

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Tahun 2023

Kabupaten Pringsewu mempunyai beberapa gunung yang tersebar di masing-masing kecamatan yaitu gunung Bayas di Kecamatan Banyumas, gunung Lintang di Kecamatan Adiluwih, gunung Tanjung Mas, Widoro Payung, Kepar I dan II berada di Kecamatan Gadingrejo. Selain itu Kabupaten Pringsewu memiliki potensi sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer, bentonit, andesit dan lain-lain serta disamping itu juga terdapat sumber daya air mineral.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dalam kurun tahun 2011-2018 selalu mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Di tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 404.408 jiwa yang terdiri dari laki-laki 208.957 jiwa dan perempuan 195.451 jiwa. Di tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 406.731 jiwa terdiri dari jumlah laki-laki 209.580 jiwa dan jumlah perempuan 197.151 jiwa. Di tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 410.864 jiwa (semester 1 tahun 2021) dari



jumlah laki-laki 210.992 jiwa dan jumlah perempuan 199.872 jiwa. Di tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 423.837 jiwa. terdiri jumlah laki-laki 217.173 jiwa dan jumlah perempuan 206.664 Jiwa. Di tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 433.624 jiwa. terdiri jumlah laki-laki 221.938 jiwa dan jumlah perempuan 211.686 Jiwa Adanya kenaikan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya (2011-2022) dan peningkatan pada tahun 2023 disebabkan Hasil Data Agregat Kependudukan semester 1 Tahun 2023 dari Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2023 terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu.

Lihat Tabel 1.7 berikut ini.

Tabel.1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2012	199.613	186.724	386.337
2	2013	246.562	232.726	479.288
3	2014	234.003	217.937	451.940
4	2015	215.596	202.425	418.021
5	2016	216.157	202.694	418.851
6	2017	217.286	204.259	421.545
7	2018	218.198	205.059	423.257
8	2019	208.957	195.451	404.408
9	2020	209.580	197.151	406.731
10	2021	210.992	199.872	410.864
11	2022	217.173	206.664	423.837
12	2023	221.938	211.686	433.624

Sumber :Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pringsewu dengan jumlah kepadatan 1.627 jiwa/km² dan kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Kecamatan Pagelaran Utara sebesar 149 jiwa/ km² dengan rincian pada Tabel 1.8 berikut.



Tabel.1.8
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/km ²
1	Pardasuka	87,31	37.617	397
2	Ambarawa	33,11	39.287	1.268
3	Pagelaran	48,42	55.559	878
4	Pringsewu	45,28	86.862	1.627
5	Gading Rejo	67,79	83.544	975
6	Sukoharjo	65,59	53.249	730
7	Banyumas	42,71	23.056	579
8	Adiluwih	68,80	38.273	512
9	Pagelaran Utara	158,19	16.357	149
	Jumlah	617,20	433.624	693

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. Jumlah Kecamatan dan Desa

Menurut administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi kedalam 9 (sembilan) kecamatanyang terdiri dari 126 (seratus dua puluh enam) Pekon dan 5 (lima) Kelurahan dengan rincian seperti pada Tabel 1.9 berikut ini :

Tabel.1.9
Pembagian Wilayah Kecamatan dan Desa Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jumlah pekon/kel	luas (km ²)	luas (ha)
1	Pardasuka	13	87,31	9.464
2	Ambarawa	8	33,11	3.099
3	Pagelaran	22	48,42	7.247
4	Pringsewu	10/ 5	45,28	5.329
5	Gading Rejo	23	67,79	8.571
6	Sukoharjo	16	65,59	7.295
7	Banyumas	11	42,71	3.985
8	Adiluwih	13	68,80	7.482
9	Pagelaran Utara	10	158,19	10.028
	Jumlah	126/ 5	617,20	617,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dan data Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2022 serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tahun 2023.



Berikut ini adalah daftar Kecamatan dan Kelurahan serta Pekon di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, 5 (lima) kelurahan, dan 126 (seratus dua puluh enam) Pekon seperti pada tabel 1.10 berikut ini:

Tabel.1.10
Daftar Kecamatan dan Kelurahan serta Pekon
di Kabupaten Pringsewu

No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon	No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon
1.	ADILUWIH	1. Adiluwih 2. Bandung Barat 3. Bandung Baru 4. Enggal Rejo 5. Kutawaringin 6. Purwodadi 7. Sinar Waya 8. Srikaton 9. Sukoharum 10. Totokarto 11. Tritunggal Mulya 12. Tunggul Pawenang 13. Waringin Sari Timur	6.	PAGELARAN UTARA	1. Fajar Baru 2. Fajar Mulya 3. Giri Tunggal 4. Gunung Raya 5. Kemilin 6. Madaraya 7. Margosari 8. Neglasari 9. Sumber Bandung 10. Way Kunir
2.	AMBARAWA	1. Ambarawa 2. Ambarawa Barat 3. Ambarawa Timur 4. Jati Agung 5. Kresnomulyo 6. Margodadi 7. Sumber Agung 8. Tanjung Anom	7.	PARDASUKA	1. Kedaung 2. Pardasuka 3. Pardasuka Selatan 4. Pardasuka Timur 5. Pujodadi 6. Rantau Tijang 7. Selapan 8. Sidodadi 9. Suka Negeri 10. Sukorejo 11. Tanjung Rusia 12. Tanjung Rusia Timur 13. Warga Mulyo



No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon	No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon
3.	BANYUMAS	1. Banjarejo 2. Banyumas 3. Banyu Urip 4. Banyu Wangi 5. Mulyorejo 6. Nusawungu 7. Sinar Mulya 8. Sri Rahayu 9. Sriwungu 10. Sukamulya 11. Waya Krui	8.	PRINGSEWU	KELURAHAN : 1. Fajaresuk 2. Pringsewu Barat 3. Pringsewu Selatan 4. Pringsewu Timur 5. Pringsewu Utara PEKON : 1. Bumiaram 2. Bumi Agung 3. Fajar Agung 4. Fajar Agung Barat 5. Margakarya 6. Podomoro 7. Podosari 8. Rejo Sari 9. Sidoharjo 10. Waluyoajati
4.	GADING REJO	1. Blitarejo 2. Bulukarto 3. Bulurejo 4. Gadingrejo 5. Gading Rejo Timur 6. Gading Rejo Utara 7. Kediri 8. Klaten 9. Mataram 10. Panjerejo 11. Parerejo 12. Tambahrejo 13. Tambah Rejo Barat 14. Tegalsari 15. Tulung Agung 16. Wates 17. Wates Timur 18. Wates Selatan 19. Wonodadi 20. Wonodadi	9.	SUKOHARJO	1. Keputran 2. Pandansari 3. Pandasari Selatan 4. Pandansurat 5. Panggungrejo 6. Panggungrejo Utara 7. Siliwangi 8. Sinar Baru 9. Sinar Baru Timur 10. Sukoharjo I 11. Sukoharjo II 12. Sukoharjo III 13. Sukoharjo III Barat 14. Sukoharjo IV 15. Sukoyoso 16. Waringin Sari Barat



No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon	No.	Nama Kecamatan	Nama Pekon
		Utara 21. Wonosari 22. Yogyakarta 23. Yogyakarta Selatan			
5.	PAGELARAN	1. Bumiratu 2. Bumirejo 3. Candiretno 4. Ganjaran 5. Gemahripah 6. Gumukmas 7. Gumukrejo 8. Karang Sari 9. Lugusari 10. Padangrejo 11. Pagelaran 12. Pamenang 13. Panutan 14. Pasir Ukir 15. Patoman 16. Pujiharjo 17. Sidodadi 18. Sukaratu 19. Sukawangi 20. Sumberejo 21. Tanjung Dalam 22. Way Ngison			

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2022

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja perangkat daerah dan Pegawai Pemerintah

Daftar Perangkat Daerah, Unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah seperti pada tabel 1.11 sampai dengan tabel 1.14 sebagai berikut :



Tabel 1.11
JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Kode Surat
I.	UNSUR PENUNJANG	
1.	Sekretariat Daerah	
	Bagian Hukum	U.01
	Bagian Pemerintahan	U.02
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	U.03
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	U.04
	Bagian Administrasi Pembangunan	U.05
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	U.06
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	U.07
	Bagian Organisasi	U.08
	Bagian Umum	U.09
2.	Sekretariat DPRD	
	Bagian Umum dan Keuangan	U.10
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	U.11
	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	U.12
3.	Inspektorat	
	Sekretariat	U.13
	Inspektur Pembantu Wilayah I	U.14
	Inspektur Pembantu Wilayah II	U.15
	Inspektur Pembantu Wilayah III	U.16
	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	U.17
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	U.18
5.	Staf Ahli Bupati	
	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	U.19
	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	U.20
	Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum	U.21
II.	DINAS-DINAS	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	D.01
2.	Dinas Kesehatan	D.02
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	D.03
4.	Dinas Sosial	D.04
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	D.05
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	D.06
7.	Dinas Ketahanan Pangan	D.07
8.	Dinas Lingkungan Hidup	D.08
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	D.09
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	D.10
11.	Dinas Perhubungan	D.11
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	D.12



No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Kode Surat
13.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	D.13
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	D.14
15.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	D.15
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	D.16
17.	Dinas Perikanan	D.17
18.	Dinas Pertanian	D.18
III	BADAN-BADAN	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B.01
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B.02
3.	Badan Pendapatan Daerah	B.03
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B.04
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B.05
IV.	LEMBAGA LAINNYA	
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	LL.01
V.	KECAMATAN	
1.	Kecamatan Gadingrejo	C.01
2.	Kecamatan Pringsewu	C.02
3.	Kecamatan Pagelaran	C.03
4.	Kecamatan Sukoharjo	C.04
5.	Kecamatan Pardasuka	C.05
6.	Kecamatan Banyumas	C.06
7.	Kecamatan Adiluwih	C.07
8.	Kecamatan Ambarawa	C.08
9.	Kecamatan Pagelaran Utara	C.09
VI.	KELURAHAN	
1.	Kelurahan Pringsewu Barat	L.01
2.	Kelurahan Pringsewu Selatan	L.02
3.	Kelurahan Pringsewu Timur	L.03
4.	Kelurahan Pringsewu Utara	L.04
5.	Kelurahan Fajar Esuk	L.05

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Pringsewu Tahun 2023



Tabel 1.12
Daftar Pegawai Pemerintah Berdasarkan Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Des
2023

JABATAN	CPNS		PNS		PPPK		JML
	L	P	L	P	L	P	
Eselon I.b	-	-	-	-	-	-	-
Eselon II.a	-	-	1	-	-	-	1
Eselon II.b	-	-	24	4	-	-	28
Eselon III.a	-	-	39	9	-	-	48
Eselon III.b	-	-	61	21	-	-	82
Eselon IV.a	-	-	74	49	-	-	123
Eselon IV.b	-	-	23	28	-	-	51
Pelaksana	3	2	281	276	-	-	562
Fungsional			1.057	2.072	165	483	3.777
TOTAL	3	2	1.560	2.459	165	483	4.672

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2023



Tabel 1.13
Daftar Pegawai Pemerintah Berdasarkan Golongan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

GOLONGAN	CPNS		PNS		PPPK		JML
	L	P	L	P	L	P	
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	1	1	155	236	9	1	403
II/a	-	-	10	1	4	-	15
II/b	-	-	17	7	-	-	24
II/c	1	1	67	141	5	1	216
II/d	-	-	61	87	-	-	148
Jumlah Gol. III	2	1	907	1.547	156	482	3.095
III/a	2	1	246	492	156	482	1.379
III/b	-	-	206	375	-	-	581
III/c	-	-	173	308	-	-	481
III/d	-	-	282	372	-	-	654
Jumlah Gol. IV	-	-	498	676	-	-	1.174
IV/a	-	-	244	271	-	-	515
IV/b	-	-	228	389	-	-	617
IV/c	-	-	25	16	-	-	41
IV/d	-	-	1	-	-	-	1
IV/e	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3	2	1.560	2.459	165	483	4.672

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2023



Tabel 1.14
Daftar Pegawai Pemerintah Berdasarkan Jenis Kelamin di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	PPPK	JML
LAKI-LAKI	3	1.560	165	1.728
PEREMPUAN	2	2.459	483	2.944
TOTAL	5	4.019	648	4.672

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2023



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 2.1 Capaian Kinerja Makro**
- 2.2 Capaian Kinerja Outcome**
- 2.3 Capaian Kinerja Output**

**PELAPORAN IKK MAKRO 2023
KABUPATEN PRINGSEWU**

TANGGAL CETAK

21-03-2024 03:26

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023	SATUAN	PEMDA			APIP		
							KETERANGAN	BUKTI FISIK	PERBAR	STATUS	KETERANGAN	DIPERBARUI
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	72,57	73,11	0,744	%	Capaian Kinerja Makro BPS Kabupaten Pringsewu	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-03-06 09:00:00
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	9,34	9,14	-2,141	%	Capaian Kinerja Makro BPS Kab.Pringsewu	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-02-29 11:00:00
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	4,77	4,66	-2,306	%	Capaian kinerja Makro BPS Kab.Pringsewu	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-02-29 11:00:00
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,37	4,78	9,382	%	Capaian Kinerja Makro BPS Kab.Pringsewu tgl 27 Feb 2024	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-02-29 12:00:00
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	30,984	33,39	7,763	%	Capaian kinerja makro BPS Kab.Pringsewu tgl 27 Feb 2024	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-02-29 12:00:00
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0,272	0,306	12,5	%	Capaian kinerja Makro BPS Kab.Pringsewu Tahun 2023	Ada	0000-00-00 00:00:00	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-02-29 11:00:00

**PELAPORAN IKK 2023
KABUPATEN PRINGSEWU**

Tanggal Cetak 21-03-2024 03:25

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP			
						Capaian	Keterangan	File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	69,884992	Keluarga tidak	Ada	2024-01-26	OK	Data yang disajikan dan	2024-03-05
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah pada kab/kota yang bersangkutan = 41541. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 49007	84,765442	Faktor ekonomi orang tua	Ada	2024-01-26 12:51:22	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik telah sesuai	2024-03-06 11:37:49
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 18442. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 22879	80,60667	sudah ada yang membantu cari uang untuk orang tua	Ada	2024-01-26 12:52:35	OK	Data yang disajikan dan bukti fisik sudah sesuai	2024-03-06 13:36:25
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan dasar dan menengah yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 621. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 104997	0,5914455	sudah diberitahu manfaat sekolah namun karena ada yang sudah bisa mencari uang sendiri jadi malas ikut nya	Ada	2024-01-26 12:53:26	OK	Data yang disajikan dan bukti pendukung sudah sesuai	2024-03-06 13:45:44

1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 2455. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 2470	99,392713	Anggaran belum memenuhi untuk melaksanakan kegiatan	Ada	2024-01-24 11:43:07	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:19:18
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 974. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 1758	55,403868	Anggaran belum mencukupi	Ada	2024-01-24 11:44:04	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:15:45
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 98. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 259	37,837838	Anggaran belum mencukupi	Ada	2024-01-24 11:45:57	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:14:52
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 73. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 73	100	Prasarana dan SDM belum mencukupi	Ada	2024-01-24 11:47:11	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:13:15
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	70 kejadian masuk respon time 15 menit, 3 kejadian tidak masuk respon time 15 menit lebih	Ada	2024-01-24 14:01:13	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:12:17
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan ke darurat yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket makanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah	 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 72992. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 76776	95,071377		Ada	2024-02-05 15:03:20	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:10:10

1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah korban bencana yang mendapat makanan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia 	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya dalam satu tahun anggaran = 54. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 54	100	Ada	2024-02-05 15:03:54	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:08:49
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. 	 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 12. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 12	100 Sesuai RTKD memang sesuai anggaran	Ada	2024-02-01 08:51:01	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:07:47
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan Persentase LPK yang terakreditasi Persentase LPK yang memiliki perizinan Jumlah pengangur yang dilatih Persentase lulusan bersertifikat pelatihan Persentase penyerapan lulusan Lulusan bersertifikat kompetensi Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 	 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 100. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 217033	0,0460759 Yang dilatih hanya 100 orang keterbatasan anggaran	Ada	2024-02-01 08:52:30	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:06:22
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas Data tingkat produktivitas total 	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 8214156.98. Jumlah tenaga kerja = 217033	3784,7502	Ada	2024-02-01 08:54:11	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:05:04
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah mogok kerja Jumlah penutupan perusahaan Jumlah perselisihan kepentingan Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan Jumlah perselisihan PHK Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite Lumrah Kerja Sama (LKS) Tripartit 	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 9. Jumlah Perusahaan = 12	75 Minat investasi masih belum optimal	Ada	2024-02-01 08:55:27	OK	data yang disajikan dan bukti 2024-03-06 21:04:16

2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,21 TFR hasil capaian Provinsi berdasarkan PK 23 sudah termasuk angka aman walau belum mencapai target	Ada	2024-02-12 14:13:44	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:14:19
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Keselatan (Faskes) yang siap melayani KB MKIP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBP yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 42307. Jumlah Pasangan Usia Subur = 61857	68,394846 anggaran nya belum optimal, stok Alat Kontrasepsi kurang mencukupi	Ada	2024-02-12 14:21:15	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:13:36
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayar = 7912. Jumlah Pasangan Usia Subur = 61857	12,790792 Kurangnya kesadaran pasangan usia subur untuk ber-KB, stok alat kontrasepsi masih belum optimal.	Ada	2024-02-12 14:23:05	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:12:44
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,64 Angkutan Pedesaan banyak yang sudah tidak beroperasi, angkutan sungai dan penyebrangan belum tersedia	Ada	2024-01-18 11:18:34	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:11:17
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,23 kurangnya petugas lalu lintas	Ada	2024-01-18 11:17:16	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:09:08
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 28. Jumlah PD = 37	75,675676 Jaringan Internet Network kurang optimal, Bandwidth internet kecil	Ada	2024-02-13 15:24:41	OK	data yang disajikan dan bukti2024-03-06 telah sesuai 20:08:14

2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	<p>1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</p>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 2. Jumlah Layanan Publik = 12	16,666667	Ada	2024-02-13 15:25:51	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 20:07:11
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 108085. Jumlah penduduk = 315650	34,24204	Ada	2024-03-07 12:42:28	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-13 06:21:15
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah</p>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 47. Jumlah seluruh koperasi aktif = 99	47,474748	Ada	2024-01-30 10:29:29	OK	Kurangnya permodalan bagi koperasi untuk berjalan data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 20:03:59
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro</p> <p>2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)</p> <p>3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</p> <p>4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</p> <p>5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</p> <p>6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</p> <p>7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan</p>	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 4473. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 24779	18,051576	Ada	2024-01-30 10:28:27	OK	Kurangnya permodalan dan pemasaran hasil produksi data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 20:03:11

2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting Kegiatan pameran penanaman modal Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal Laporan realisasi penanaman modal Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota 	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 641939698000. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 715904000000	89,68405	Belum optimalnya promosi penanaman modal dan belum tersedianya regulasiterkait pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha	Ada	2024-03-13 06:29:29	OK	data yang disajikan dan bukti sesuai 2024-03-13 06:30:44
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 1842. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 99991	1,8421658		Ada	2024-02-07 13:08:58	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 19:58:15
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 645. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 99991	0,6450581		Ada	2024-02-07 13:09:56	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 19:57:15
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 	Peningkatan prestasi olahraga	18			Ada	2024-02-07 13:10:40	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 19:55:58
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya buku profil daerah Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 37. jumlah PD = 37	100		Ada	2024-02-13 15:35:20	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 19:54:09
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya buku profil daerah Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 37. jumlah PD = 37	100		Ada	2024-02-13 15:35:51	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai 2024-03-06 19:53:27

3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 58400. Jumlah kamar yang tersedia = 116435	50,15674	Ada	2024-02-15 16:13:24	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai	2024-03-06 19:27:36	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 33307660000. Total PDRB Berlaku = 1285231890000	2,5915681	Ada	2024-02-21 14:57:38	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai	2024-03-06 19:24:56	
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p> <p>10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat</p> <p>&nbsp;</p>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 5707205046. Total realisasi PAD = 137668451081.83	4,1456158	realisasi target sudah tinggi tidak ada masalah	Ada	2024-01-23 13:51:38	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai	2024-03-06 19:23:59
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	<p>1. Sarana pertanian yang diberikan</p> <p>2. Prasarana pertanian yang digunakan</p> <p>3. Penerbitan izin usaha pertanian</p> <p>4. Persentase prasarana yang digunakan</p> <p>5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota</p> <p>n</p> <p>&nbsp;</p>	Produktivitas petanian per hektar per tahun Produktivitas petanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 124652. luas panen = 21752	573,05995	1. Rendahnya ketersediaan air dan curah hujan di Kabupaten Pringsewu mengakibatkan fluktuasi produksi pertanian terutama padi dan jagung sehingga membuat usaha pertanian kurang optimal;	Ada	2024-02-02 11:02:43	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai	2024-03-06 19:22:04
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	<p>1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana</p> <p>&nbsp;</p>	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -45. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 84	-53,57143	2. Nilai tukar petani yang relatif rendah;	Ada	2024-02-02 11:09:15	OK	data yang disajikan dan bukti telah sesuai	2024-03-06 19:20:05
							3. Terjadinya alih ft	Ada				
							Keterbatasan SDM tenaga medik veteriner untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten pringsewu	Ada				

**PELAPORAN IKK OUTPUT 2023
KABUPATEN PRINGSEWU**

Tanggal Cetak 21-03-2024 03:26

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai	Diperbarui	PEMDA Keterangan	File Bukti	Status	APIP Keterangan	Diperbarui
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pendidikan		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	267	14:22:47	Kebudayaan	Ada			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9844	2024-01-25 14:23:06	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9844	2024-01-25 14:23:23	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	801	2024-01-25 14:23:41	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	1077	2024-01-25 14:23:59	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	623	2024-01-25 14:24:16	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	267	2024-01-25 14:24:45	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	328	2024-01-25 14:25:19	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	44756	2024-01-25 14:25:40	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	24581	2024-01-25 14:26:04	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44756	2024-01-25 14:26:35	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24581	2024-01-25 14:26:52	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2394	2024-01-25 14:27:09	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	744	2024-01-25 14:27:35	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3197	2024-01-25 14:27:55	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1842	2024-01-25 14:28:20	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	266	2024-01-25 14:28:33	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	62	2024-01-25 14:28:46	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	266	2024-01-25 14:29:02	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	62	2024-01-25 14:29:37	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3012	2024-01-25 14:29:52	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	800	2024-01-25 14:30:05	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	266	2024-01-25 14:30:18	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	62	2024-01-25 14:30:29	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2.1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	622	2024-01-25 14:30:46	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada			

19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	622	2024-01-25 14:31:39	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.2.1.a.3					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	8	2024-01-25 14:31:55	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1844	2024-01-25 14:32:08	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1844	2024-01-25 14:32:39	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	11	2024-01-25 14:33:15	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	86	2024-01-25 14:33:29	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	11	2024-01-25 14:33:41	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	I.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	11	2024-01-25 14:34:03	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	I.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	11	2024-01-25 14:34:33	ikk output Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	2024-02-01 12:37:51	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	7	2024-02-01 12:38:00	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	69839	2024-02-01 12:38:41	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1567	2024-02-01 12:38:56	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19986	2024-02-01 12:39:10	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1567	2024-02-01 12:39:21	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	33645	2024-02-01 12:39:35	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1567	2024-02-01 12:39:48	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	173550	2024-02-01 12:40:00	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3652	2024-02-01 12:40:11	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	183431	2024-02-01 12:40:24	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3652	2024-02-01 12:40:36	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	267	2024-02-01 12:40:48	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3657	2024-02-01 12:41:04	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	106834	2024-02-01 12:41:20	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3657	2024-02-01 12:42:15	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65	2024-02-01 12:42:28	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3657	2024-02-01 12:42:42	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
			1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5053	2024-02-01 12:43:00	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1649	2024-02-01 12:43:14	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65	2024-02-01 12:43:25	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	13	2024-02-01 12:43:36	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	104	2024-02-01 12:43:55	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1711	2024-02-01 12:44:14	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	52	2024-02-01 12:44:24	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2263	2024-02-01 12:44:36	Ikk Output Dinas Kesehatan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	2024-01-31 08:43:38	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	2024-01-31 08:43:47	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	2024-01-31 08:43:56	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	2024-01-31 08:44:18	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	2024-01-31 10:26:48	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	2024-01-31 10:26:56	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1.c.2	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	2024-01-31 10:27:07	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	2024-01-31 10:27:16	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	2024-01-31 08:44:45	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	2024-01-31 08:44:31	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	2024-01-31 10:24:43	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	2024-01-31 10:32:18	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	2024-01-31 10:32:34	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	2024-01-31 10:32:49	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	2024-01-31 10:33:05	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	140	2024-01-31 10:33:25	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	160	2024-01-31 10:33:38	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	300	2024-01-31 10:33:49	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	67	2024-01-31 10:36:41	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	67	2024-01-31 10:36:51	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	5217	2024-01-31 10:37:10	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada

7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	140	2024-01-31 10:37:27	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	140	2024-01-31 10:37:37	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	5077	2024-01-31 10:38:01	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	14	2024-01-31 10:38:11	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2	2024-01-31 10:38:20	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1	2024-01-31 10:38:29	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
13	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	300	2024-01-31 10:39:52	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
14	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	67	2024-01-31 10:40:04	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	2024-01-31 10:40:15	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	68	2024-01-31 10:40:26	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	2024-01-31 10:40:38	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	2024-01-31 10:40:47	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	2024-01-31 10:40:58	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	2024-01-31 10:41:07	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	2024-01-31 10:41:19	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	20	2024-01-31 10:41:39	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	0			
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	0			
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	0			
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0			
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0			
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0			
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0			
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	0			
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	0			
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	2024-02-07 14:29:28	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	13,4	2024-01-31 10:47:30	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	1	2024-01-31 10:47:49	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	2024-01-31 10:47:57	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	2024-01-31 10:48:06	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	2024-01-31 10:48:15	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada

7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	2024-01-31 10:48:29	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	2024-01-31 10:44:57	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	2024-01-31 10:44:47	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	2024-01-31 10:48:50	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	2024-01-31 10:52:50	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	0	2024-01-31 10:44:36	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
13	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	2024-01-31 10:44:27	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
14	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	2024-01-31 10:43:29	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
15	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:49:01	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
16	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:52:59	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
17	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:52:39	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
18	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	2024-01-31 10:43:39	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
19	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	2024-01-31 10:49:10	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
20	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	2024-01-31 10:52:30	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
21	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	2024-01-31 10:52:21	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
22	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	2024-01-31 10:52:12	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
23	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:52:03	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
24	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:44:12	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
25	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	2024-01-31 10:49:26	ikk Output Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2334	2024-01-30 14:37:08	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	2024-01-30 14:37:21	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	2024-01-30 14:37:34	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	2024-01-30 14:37:43	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	2024-01-30 14:37:53	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	2024-01-30 14:38:33	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	2024-01-30 14:38:42	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	2024-01-30 14:38:51	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	2024-01-30 14:39:00	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	2024-01-30 14:39:17	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	2024-01-30 14:39:26	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	2024-01-30 14:39:35	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	2024-01-30 14:39:46	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	2024-01-30 14:39:58	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	2024-01-30 14:40:11	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	231934	2024-01-30 14:42:48	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	3783	2024-01-30 14:43:11	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	2024-01-30 14:43:29	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	104542	2024-01-30 14:43:51	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	3783	2024-01-30 14:44:09	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	4381	2024-01-30 14:44:45	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	2024-01-30 14:44:58	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Rasio rumah dan KK	0	2024-01-30 14:45:08	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	50	2024-01-30 14:45:24	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	16	2024-01-30 14:45:37	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	680	2024-01-30 14:45:51	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	680	2024-01-30 14:46:04	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	2	2024-01-30 14:46:18	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	472	2024-01-30 14:46:33	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	8	2024-01-30 14:46:47	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	8	2024-01-30 14:47:31	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	8	2024-01-30 14:48:16	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	8	2024-01-30 14:47:45	ikk output Perumahan dan kawasan permukiman	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibus dalam Kab/Kota yang ditangani	51	2024-02-06 12:06:22	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1209	2024-02-06 12:06:56	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	2024-02-06 12:07:11	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	2024-02-06 12:07:31	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8	2024-02-06 12:07:45	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	2024-02-06 12:08:04	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	2024-01-24 14:08:33	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	2024-01-24 14:08:21	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	2024-01-24 14:01:55	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	2024-01-24 14:02:08	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	12	2024-01-24 11:56:46	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	2024-01-24 14:07:30	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	2024-01-24 11:57:21	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	2024-01-24 11:57:33	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	2024-01-24 11:57:48	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	2024-01-24 11:58:00	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	42	2024-01-24 11:58:14	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	98	2024-01-24 11:58:57	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0	2024-01-24 11:59:26	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	2024-01-24 11:59:45	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	15	2024-01-24 12:00:10	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	3	2024-01-24 14:06:42	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	87	2024-01-24 14:05:59	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	12	2024-01-24 12:01:47	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	42	2024-01-24 12:02:13	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	2024-01-24 12:02:28	ikk output BPBD 1 dan Satpolpp	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	123	2024-02-06 13:15:46	ikk Output Dinas sosial	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	76776	2024-02-06 13:16:04	ikk Output Dinas sosial	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	2024-02-06 13:16:15	ikk Output Dinas sosial	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	72992	2024-02-06 13:16:33	ikk Output Dinas sosial	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	2024-02-06 13:16:45	ikk Output Dinas sosial	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2187	2024-02-06 13:17:15	ikk Output Dinas sosial	Ada

7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	2024-02-06 13:17:26	ikk Output Dinas sosial	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	332	2024-02-06 13:17:39	ikk Output Dinas sosial	Ada
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	228	2024-02-06 13:17:56	ikk Output Dinas sosial	Ada
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	2024-02-06 13:18:08	ikk Output Dinas sosial	Ada
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	2024-02-06 13:18:20	ikk Output Dinas sosial	Ada
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	2024-02-06 13:18:32	ikk Output Dinas sosial	Ada
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	2024-02-06 13:18:46	ikk Output Dinas sosial	Ada
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	349	2024-02-06 13:19:02	ikk Output Dinas sosial	Ada
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	10	2024-02-06 13:19:25	ikk Output Dinas sosial	Ada
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	2024-02-06 13:19:40	ikk Output Dinas sosial	Ada
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	2024-02-06 13:19:52	ikk Output Dinas sosial	Ada
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	72992	2024-02-06 13:20:26	ikk Output Dinas sosial	Ada
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	12	2024-02-06 13:20:40	ikk Output Dinas sosial	Ada
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	12	2024-02-06 13:21:04	ikk Output Dinas sosial	Ada
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	72992	2024-02-06 13:21:23	ikk Output Dinas sosial	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	54	2024-02-06 13:22:07	ikk Output Dinas sosial	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	54	2024-02-06 13:23:28	ikk Output Dinas sosial	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	2024-02-06 13:22:18	ikk Output Dinas sosial	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	54	2024-02-06 13:23:06	ikk Output Dinas sosial	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	2024-02-06 13:23:17	ikk Output Dinas sosial	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	20	2024-02-06 13:22:30	ikk Output Dinas sosial	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	2024-02-01 08:57:35	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	100	2024-02-01 08:57:52	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	2024-02-01 08:58:06	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	2024-02-01 08:58:19	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikatkompetensi	100	2024-02-01 08:58:30	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2	2024-02-01 08:58:41	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	48	2024-02-01 08:58:55	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada

5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	57	2024-02-01 08:59:05	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	100	2024-02-01 08:59:15	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	2024-02-01 08:59:26	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	100	2024-02-01 08:59:36	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	2024-02-01 08:59:47	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	8	2024-02-01 08:59:57	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	8	2024-02-01 09:00:07	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	2024-02-01 09:00:17	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0	2024-02-01 09:00:28	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	75	2024-02-01 09:00:40	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	25	2024-02-01 09:00:50	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	75	2024-02-01 09:01:05	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	8	2024-02-01 09:01:16	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	2024-02-01 09:01:27	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	2024-02-01 09:01:38	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	0	2024-02-01 09:02:06	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0	2024-02-01 09:02:16	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	0	2024-02-01 09:02:25	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	2024-02-01 09:02:36	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	0	2024-02-01 09:02:45	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	2024-02-01 09:02:55	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	2024-02-01 09:03:06	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	2024-02-01 09:03:16	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
15	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	2024-02-01 09:03:28	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3	2024-02-01 09:03:37	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	603	2024-02-01 09:03:49	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	32	2024-02-01 09:03:59	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	2024-02-01 09:04:08	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada

5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	2024-02-01 09:04:20	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	2024-02-01 09:04:45	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	6	2024-02-01 09:05:11	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	2024-02-01 09:05:22	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	912	2024-02-01 09:05:36	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdaftar	912	2024-02-01 09:05:48	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepelugan	0	2024-02-01 09:06:00	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	8	2024-02-01 09:06:17	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	9	2024-02-01 09:06:28	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	2024-02-01 09:06:39	ikk output Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	36	2024-02-07 15:01:55		Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	22	2024-02-07 15:02:08		Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	2024-02-07 15:02:20		Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	2024-02-07 15:02:31		Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	2024-02-07 15:02:47		Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	2024-02-07 15:03:01		Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	2024-02-07 15:03:09		Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	14	2024-02-07 15:03:19		Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	556	2024-02-07 15:03:32		Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2	2024-02-07 15:03:43		Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	2024-02-07 15:03:51		Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	2024-02-07 15:04:00		Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0	2024-02-07 15:04:17		Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	2024-02-07 15:04:27		Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	2024-02-06 13:46:04	ikk Output Pangan	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	500	2024-02-06 13:46:42	ikk Output Pangan	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	2024-02-06 13:46:58	ikk Output Pangan	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2	2024-02-06 13:47:42	ikk Output Pangan	Ada

5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	2024-02-06 13:48:09	ikk Output Pangan	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	2	2024-02-06 13:48:36	ikk Output Pangan	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	500	2024-02-06 13:48:58	ikk Output Pangan	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	15	2024-02-06 13:49:17	ikk Output Pangan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	2024-01-26 14:04:02	IKK Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	2024-01-26 14:04:16	IKK Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	2024-01-26 14:04:41	IKK Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	0	2024-01-26 14:05:03	IKK Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1.2.i.2.2.i.3.2.i.4.2.i.5.2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1	2024-01-26 14:05:43	IKK Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu	Ada
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	57,22	2024-01-29 12:11:50	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,98	2024-01-29 12:12:11	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	35	2024-01-29 12:15:08	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1	2024-01-29 12:16:35	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	145	2024-01-29 12:17:52	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,03	2024-01-29 12:27:51	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota/Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	2024-01-29 12:19:16	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	2024-01-29 12:20:28	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	5	2024-01-29 12:19:57	ikk Output Dinas Lingkungan Hidup	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	96489	2024-02-13 19:20:23	ikk output Disdukcapil	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta perceraian	3649	2024-02-13 19:20:52	ikk output Disdukcapil	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penerbitan akta kematian	11635	2024-02-13 19:21:21	ikk output Disdukcapil	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.2.k.2	Penyajian data kependudukan	2	2024-02-13 19:22:10	ikk output Disdukcapil	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	126	2024-01-22 11:05:30	ikk Output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab.Pringsewu Tahun 2023	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	45	2024-01-22 11:06:16	ikk Output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab.Pringsewu Tahun 2023	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	268	2024-01-22 11:06:32	ikk Output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab.Pringsewu Tahun 2023	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1.2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	2024-01-22 11:06:55	ikk Output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab.Pringsewu Tahun 2023	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	2024-02-12 14:50:16	ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,8	2024-02-12 14:50:34	ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada

3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19,3	2024-02-12 14:50:51	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	79,87	2024-02-12 14:51:11	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	131	2024-02-12 14:51:25	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	2024-02-12 14:51:42	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,3	2024-02-12 14:52:03	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	2024-02-12 14:52:18	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	68,4	2024-02-12 14:52:34	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0	2024-02-12 14:52:48	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	23,87	2024-02-12 14:53:04	Ikk Output Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	36,36	2024-01-18 11:23:01		Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	97,97	2024-01-18 11:23:29		Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	4000	2024-01-18 11:24:45		Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	26	2024-01-18 11:25:09		Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	37	2024-02-13 16:09:35	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	28	2024-02-13 16:10:11	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	37	2024-02-13 16:09:59	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	37	2024-02-13 16:10:25	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	37	2024-02-13 16:10:39	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	37	2024-02-13 16:10:56	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	2024-02-13 16:11:08	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	1	2024-02-13 16:11:33	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	31	2024-02-13 16:11:46	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	2024-02-13 16:11:57	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	2024-02-13 16:12:06	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	2024-02-13 16:12:29	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	2024-02-13 16:14:17	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	39	2024-02-13 16:14:03	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	2024-02-13 16:13:47	Ikk Output Dinas kominfo Tahun 2023	Ada

13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	2024-02-13 16:13:29	Ikk Output Dinas kominfoTahun 2023	Ada
14	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	2024-02-13 16:13:20	Ikk Output Dinas kominfoTahun 2023	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	61,39	2024-02-13 16:13:11	Ikk Output Dinas kominfoTahun 2023	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	2024-02-13 16:12:57	Ikk Output Dinas kominfoTahun 2023	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase disseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	2024-02-13 16:12:43	Ikk Output Dinas kominfoTahun 2023	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:34:08	ikk Output Koperindag	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:34:23	ikk Output Koperindag	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8	2024-01-30 11:34:49	ikk Output Koperindag	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8	2024-01-30 11:35:14	ikk Output Koperindag	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,3	2024-01-30 11:35:37	ikk Output Koperindag	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,3	2024-01-30 11:36:01	ikk Output Koperindag	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,1	2024-01-30 11:36:18	ikk Output Koperindag	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	2024-01-30 11:36:35	ikk Output Koperindag	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	51,03	2024-01-30 11:36:56	ikk Output Koperindag	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:37:16	ikk Output Koperindag	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaranuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:37:26	ikk Output Koperindag	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60	2024-01-30 11:37:43	ikk Output Koperindag	Ada
13	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:38:20	ikk Output Koperindag	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,01	2024-01-30 11:39:01	ikk Output Koperindag	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2348	2024-01-30 11:39:32	ikk Output Koperindag	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	2024-01-30 11:39:48	ikk Output Koperindag	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	2024-01-30 11:39:58	ikk Output Koperindag	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	2024-01-30 11:40:08	ikk Output Koperindag	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,01	2024-01-30 11:40:33	ikk Output Koperindag	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	2024-01-30 11:40:48	ikk Output Koperindag	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kevenangan daerah kabupaten/kota	0	2024-01-26 14:10:57	IKK Output Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	2024-01-26 14:11:58	IKK Output Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	2024-01-26 14:12:19	IKK Output Dinas PMPTSP Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	Ada

4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	2024-01-26 14:12:37	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1	2024-01-26 14:13:03	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	2024-01-26 14:13:41	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1520	2024-01-26 14:14:03	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
8	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	13735	2024-01-26 14:14:31	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
9	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	1,358E+12	2024-01-26 14:16:26	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
10	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	35	2024-01-26 14:16:49	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
11	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	206	2024-01-26 14:17:13	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
12	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	3	2024-01-26 14:17:36	Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 di Tahun 2024	IKK Output Dinas PMPTSP	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100	2024-02-07 14:21:43		ikk disporapar	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	2024-02-07 14:21:58		ikk disporapar	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaalawanan dan kepeloporan pemuda	20	2024-02-07 14:22:12		ikk disporapar	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	12	2024-02-07 14:22:28		ikk disporapar	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	9	2024-02-07 14:22:40		ikk disporapar	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	18	2024-02-07 14:23:11		ikk disporapar	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	0	2024-02-13 19:29:37		Ikk Output Statistik	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2	2024-02-13 19:29:50		Ikk Output Statistik	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	2024-02-13 19:30:02		Ikk Output Statistik	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	2024-02-13 19:30:15		Ikk Output Statistik	Ada
5	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	2024-02-13 19:30:25		Ikk Output Statistik	Ada
6	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	5	2024-02-13 19:30:36		Ikk Output Statistik	Ada
7	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1.2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	7	2024-02-13 19:30:46		Ikk Output Statistik	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	2	2024-02-13 19:37:27		ikk output persandian	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	37	2024-02-13 19:37:47		ikk output persandian	Ada
3	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	2024-02-13 19:37:59		ikk output persandian	Ada
4	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	2024-02-13 19:38:11		ikk output persandian	Ada
1	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	6	2024-01-25 14:42:25		ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
2	Usuran Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaaan keberagaman)	6	2024-01-25 14:42:39		ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6	2024-01-25 14:43:04	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	10	2024-01-25 14:43:15	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1	2024-01-25 14:43:45	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1	2024-01-25 14:44:06	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	1	2024-01-25 14:44:22	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	2024-01-25 14:44:34	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	2024-01-25 14:44:43	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	2024-01-25 14:44:51	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	2024-01-25 14:45:09	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	2024-01-25 14:45:39	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	2024-01-25 14:46:03	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	2024-01-25 14:46:20	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	2024-01-25 14:47:04	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	2024-01-25 14:47:44	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	2024-01-25 14:47:53	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	2024-01-25 14:48:02	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	2024-01-25 14:48:10	ikk output dinas pendidikan dan kebudayaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1	2024-02-06 10:10:04	ikk output perpustakaan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,01	2024-02-06 10:10:20	ikk output perpustakaan	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	7,5	2024-02-06 10:11:33	ikk output perpustakaan	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	85,45	2024-02-06 10:11:48	ikk output perpustakaan	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemsyarakatngemgar membaca di masyarakat	3425	2024-02-06 10:12:02	ikk output perpustakaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	2024-02-06 10:12:14	ikk output perpustakaan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	2024-02-06 10:12:31	ikk output perpustakaan	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	15	2024-02-06 10:12:45	ikk output perpustakaan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	37,78	2024-02-06 10:25:04	ikk output Kearsipan	Ada
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	28,89	2024-02-06 10:25:48	ikk output Kearsipan	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	85,32	2024-02-06 10:26:04	ikk output Kearsipan	Ada

4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan				2024-02-06 10:26:20	ikk output Kearsipan	Ada
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,06			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	2024-02-06 10:26:33	ikk output Kearsipan	Ada
			2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	2024-02-06 10:26:44	ikk output Kearsipan	Ada
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	2024-02-06 10:26:55	ikk output Kearsipan	Ada
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	2024-02-06 10:27:09	ikk output Kearsipan	Ada
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	87,5	2024-02-06 10:27:22	ikk output Kearsipan	Ada
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	2024-02-06 10:27:34	ikk output Kearsipan	Ada
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	123	2024-01-25 11:17:34	ikk Output Dinas Perikanan	Ada
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	2024-01-25 11:18:12	ikk Output Dinas Perikanan	Ada
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	19	2024-01-25 11:18:33	ikk Output Dinas Perikanan	Ada
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	190	2024-01-25 11:18:54	ikk Output Dinas Perikanan	Ada
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9500000	2024-01-25 11:19:19	ikk Output Dinas Perikanan	Ada
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	22	2024-02-27 13:28:36	ikk output Pariwisata	Ada
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	3	2024-02-27 13:28:58	ikk output Pariwisata	Ada
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	317	2024-02-27 13:29:15	ikk output Pariwisata	Ada
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3	2024-02-27 13:29:31	ikk output Pariwisata	Ada
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	2024-02-27 13:29:49	ikk output Pariwisata	Ada
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	2024-02-27 13:30:02	ikk output Pariwisata	Ada
7	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	2024-02-27 13:30:14	ikk output Pariwisata	Ada
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	2024-02-27 13:30:32	ikk output Pariwisata	Ada
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	700	2024-02-27 13:30:50	ikk output Pariwisata	Ada
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1.3.b.2.3.b.3.3.b.4.3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7	2024-02-27 13:31:05	ikk output Pariwisata	Ada
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	30	2024-02-02 10:31:18	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	19	2024-02-02 10:31:40	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	1	2024-02-02 10:31:58	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100	2024-02-02 10:32:19	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada
5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	2024-02-02 10:32:40	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	2024-02-02 10:33:08	ikk output Kabupaten Pringsewu Dinas Pertanian	Ada

1	Urusan Pilihan	Kehutanan							
			3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	2024-01-26 15:13:12	Surat Keterangan Pak Sekda	Ada	
2	Urusan Pilihan	Kehutanan							
			3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	2024-01-26 15:13:26	Surat Keterangan Pak Sekda	Ada	
3	Urusan Pilihan	Kehutanan							
			3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	2024-01-26 15:13:43	Surat Keterangan Pak Sekda	Ada	
4	Urusan Pilihan	Kehutanan							
			3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	2024-01-26 15:13:54	Surat Keterangan Pak Sekda	Ada	
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral							
			3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	2024-01-26 15:11:54	iKK Output Bagian Perekonomian	Ada	
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	2024-01-30 11:42:11	IKK output Koperindag	Ada	
1b	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	11,5	2024-01-30 11:42:34	IKK output Koperindag	Ada	
2	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase penerbitan TDG	31,58	2024-01-30 11:42:55	IKK output Koperindag	Ada	
3	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	2024-01-30 11:43:17	IKK output Koperindag	Ada	
4	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	2024-01-30 11:43:37	IKK output Koperindag	Ada	
5	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	2024-01-30 11:43:48	IKK output Koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	2024-01-30 11:43:58	IKK output Koperindag	Ada	
2	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	2024-01-30 11:44:10	IKK output Koperindag	Ada	
3	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	2024-01-30 11:44:26	IKK output Koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	15516,8	2024-01-30 11:44:58	IKK output Koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	81,24	2024-01-30 11:45:17	IKK output Koperindag	Ada	
2	Urusan Pilihan	Perdagangan							
			3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	2024-01-30 11:45:29	IKK output Koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian							
			3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	2024-01-30 11:46:42	ikk output koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian							
			3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	2024-01-30 11:47:00	ikk output koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian							
			3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	2024-01-30 11:47:10	ikk output koperindag	Ada	
2	Urusan Pilihan	Perindustrian							
			3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	2024-01-30 11:47:23	ikk output koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Perindustrian							
			3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0	2024-01-30 11:47:46	ikk output koperindag	Ada	
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi							
			2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	2024-02-01 09:09:11	ikk output Transmigrasi	Ada	
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi							
			2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	2024-02-01 09:09:26	ikk output Transmigrasi	Ada	
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi							
			2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	2024-02-01 09:09:57	ikk output Transmigrasi	Ada	



BAB III
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, OPINI ATAS
LAPORAN KEUANGAN DAN RINGKASAN REALISASI

- 3.1 EPPD (EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)**
- 3.2. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN**
SEBELUMNYA
- 3.3 RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**
ANGGARAN DAERAH



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023**

TENTANG

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05/1420 Tahun 2022 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Tim Nasional EPPD atas Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berprestasi tertinggi secara nasional;
2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mendapat nilai; dan
3. Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan kode wilayah.

- KETIGA : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 terdiri atas:
- a. Nama pemerintah provinsi berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berprestasi tertinggi sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi secara nasional;
 - b. Nama pemerintah kabupaten berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berprestasi tertinggi sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 414 (empat ratus empat belas) kabupaten secara nasional; dan
 - c. Nama pemerintah kota, berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berprestasi tertinggi sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 93 (sembilan puluh tiga) kota secara nasional.
- KEEMPAT : Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mendapat nilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 terdiri atas:
- a. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
 - b. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak melakukan reviu terhadap data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KELIMA : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urutan kode wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 terdiri atas:
- a. Nama pemerintah provinsi berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi secara nasional berdasarkan urutan kode wilayah;
 - b. Nama pemerintah kabupaten berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 414 (empat ratus empat belas) kabupaten secara nasional berdasarkan urutan kode wilayah; dan
 - c. Nama pemerintah kota, berdasarkan Skor dan Status Kinerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 93 (sembilan puluh tiga) kota secara nasional berdasarkan urutan kode wilayah.
- KEENAM : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berprestasi tertinggi secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas:

- a. 3 (tiga) pemerintah provinsi dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 34 (tiga puluh empat) provinsi secara nasional;
- b. 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 414 (empat ratus empat belas) kabupaten secara nasional; dan
- c. 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 93 (sembilan puluh tiga) kota secara nasional.

KETUJUH : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 3 (tiga) pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten dan 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM diusulkan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEDELAPAN : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 3 (tiga) pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) pemerintah kabupaten dan 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM diusulkan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha berupa Parasamya Purna Karya Nugraha kepada Lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi secara nasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KESEMBILAN : Bagi Daerah yang diusulkan sebagai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN akan mendapatkan pengurangan Skor dan Status Kinerja serta dibatalkan sebagai penerima penghargaan apabila:

- a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi per tanggal 1 Mei Tahun 2023 baik yang sudah maupun belum mendapatkan putusan pengadilan tetap (*inkracht*);
- b. Tidak menaati peraturan Perundang-Undangan;
- c. Tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah; dan
- d. Melakukan pelanggaran hukum pidana/perdata.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

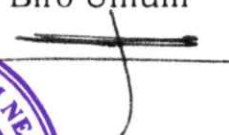
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
11. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum




Ewan Nuz Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina, TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
 TENTANG 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023
 HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
 TAHUN 2023 BERDASARKAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

A. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BERPRESTASI TERTINGGI SECARA
 NASIONAL

1. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
1	Provinsi Jawa Timur	3,6970	Tinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	3,6791	Tinggi
3	DKI Jakarta	3,6560	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	3,6485	Tinggi
5	DI Yogyakarta	3,5353	Tinggi
6	Provinsi Kalimantan Timur	3,5178	Tinggi
7	Provinsi Bali	3,4813	Tinggi
8	Provinsi Sumatera Selatan	3,4811	Tinggi
9	Provinsi Riau	3,4778	Tinggi
10	Provinsi Kepulauan Riau	3,4730	Tinggi
11	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4653	Tinggi
12	Provinsi Banten	3,4592	Tinggi
13	Provinsi Sulawesi Selatan	3,3531	Sedang
14	Provinsi Bengkulu	3,1670	Sedang
15	Provinsi Sulawesi Tengah	3,1145	Sedang
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,0439	Sedang
17	Provinsi Jambi	3,0239	Sedang
18	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,9920	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Utara	2,9723	Sedang
20	Provinsi Aceh	2,9618	Sedang
21	Provinsi Kalimantan Utara	2,9479	Sedang
22	Provinsi Sumatera Utara	2,9354	Sedang
23	Provinsi Gorontalo	2,8779	Sedang
24	Provinsi Kalimantan Barat	2,8559	Sedang

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
55	Kabupaten Banjarnegara	3,3059	Sedang
56	Kabupaten Balangan	3,3047	Sedang
57	Kabupaten Kudus	3,2995	Sedang
58	Kabupaten Padang Pariaman	3,2904	Sedang
59	Kabupaten Maros	3,2762	Sedang
60	Kabupaten Kebumen	3,2723	Sedang
61	Kabupaten Jember	3,2663	Sedang
62	Kabupaten Bintan	3,2662	Sedang
63	Kabupaten Konawe Utara	3,2597	Sedang
64	Kabupaten Lampung Tengah	3,2591	Sedang
65	Kabupaten Sinjai	3,2573	Sedang
66	Kabupaten Bogor	3,2566	Sedang
67	Kabupaten Majalengka	3,2555	Sedang
68	Kabupaten Murung Raya	3,2498	Sedang
69	Kabupaten Tana Tidung	3,2435	Sedang
70	Kabupaten Serang	3,2435	Sedang
71	Kabupaten Bangka Selatan	3,2397	Sedang
72	Kabupaten Karimun	3,2370	Sedang
73	Kabupaten Pacitan	3,2368	Sedang
74	Kabupaten Bandung	3,2321	Sedang
75	Kabupaten Cirebon	3,2313	Sedang
76	Kabupaten Kotabaru	3,2250	Sedang
77	Kabupaten Barru	3,2239	Sedang
78	Kabupaten Magelang	3,2193	Sedang
79	Kabupaten Trenggalek	3,2116	Sedang
80	Kabupaten Blora	3,2072	Sedang
81	Kabupaten Tabalong	3,2060	Sedang
82	Kabupaten Enrekang	3,1975	Sedang
83	Kabupaten Berau	3,1964	Sedang
84	Kabupaten Bantul	3,1958	Sedang
85	Kabupaten Sumbawa Barat	3,1903	Sedang
86	Kabupaten Sleman	3,1895	Sedang
87	Kabupaten Sampang	3,1885	Sedang
88	Kabupaten Cilacap	3,1844	Sedang

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
89	Kabupaten Pemalang	3,1827	Sedang
90	Kabupaten Bombana	3,1816	Sedang
91	Kabupaten Sumenep	3,1798	Sedang
92	Kabupaten Tuban	3,1774	Sedang
93	Kabupaten Pinrang	3,1745	Sedang
94	Kabupaten Belitung Timur	3,1724	Sedang
95	Kabupaten Natuna	3,1701	Sedang
96	Kabupaten Semarang	3,1605	Sedang
97	Kabupaten Tanah Datar	3,1599	Sedang
98	Kabupaten Purbalingga	3,1592	Sedang
99	Kabupaten Kuningan	3,1486	Sedang
100	Kabupaten Serdang Bedagai	3,1483	Sedang
101	Kabupaten Tapanuli Utara	3,1472	Sedang
102	Kabupaten Barito Kuala	3,1443	Sedang
103	Kabupaten Belitung	3,1432	Sedang
104	Kabupaten Bangka Barat	3,1430	Sedang
105	Kabupaten Mojokerto	3,1403	Sedang
106	Kabupaten Gunungkidul	3,1393	Sedang
107	Kabupaten Bone Bolango	3,1362	Sedang
108	Kabupaten Jepara	3,1327	Sedang
109	Kabupaten Klungkung	3,1298	Sedang
110	Kabupaten Pringsewu	3,1272	Sedang
111	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,1272	Sedang
112	Kabupaten Ciamis	3,1262	Sedang
113	Kabupaten Sarolangun	3,1194	Sedang
114	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,1135	Sedang
115	Kabupaten Nganjuk	3,1017	Sedang
116	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,0978	Sedang
117	Kabupaten Lumajang	3,0928	Sedang
118	Kabupaten Purwakarta	3,0904	Sedang
119	Kabupaten Lombok Timur	3,0903	Sedang
120	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,0887	Sedang
121	Kabupaten Kendal	3,0874	Sedang



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan III.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menjelaskan bahwa pada TA 2015, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan tahun 2014 dengan basis akrual. Dampak kualitatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam Laporan BPK Nomor 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014. Hal-hal yang mempengaruhi opini tersebut adalah adanya kekurangan kas atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan sebesar Rp511.955.297,00, tidak dapat dijelaskannya selisih nilai penyertaan modal pada PDAM Way Sekampung antara Neraca Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan PDAM Way Sekampung sebesar Rp5.807.786.796,63 serta penyajian aset tetap sebesar Rp511.725.761.266,00 tidak dapat diyakini karena tidak adanya catatan dan data yang memadai.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan penyetoran atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran, mencatat investasi permanen berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dan melakukan sensus atas Barang Milik Daerah.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30B/LHP/XVIII.BLP/06/2016 dan Nomor 30C/LHP/XVIII.BLP/06/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Bandar Lampung, 17 Juni 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nugroho Heru Wibowo, S.E. M.Comm. Ak. 7
Akuntan Register Negara No. D-16934



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22B/LHP/XVIII.BLP/05/2017 dan Nomor 22C/LHP/XVIII.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yenny, S.E., M.Acc., Ak., CA. 
Register Negara Akuntan No. 2523



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. *mb*

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2018 dan Nomor 27C/LHP/XVIII.BLP/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 24 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nugroho Heru Wibowo S.E., M.Comm., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. RNA-15561



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang

dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Nomor 17C/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 17 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. RNA-15561

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN****LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN****Laporan atas Laporan Keuangan.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21B/LHP/XVIII.BLP/06/2020 dan Nomor 21C/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 4 Juni 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. 9796



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20B/LHP/XVIII.BLP/04/2021 tanggal 27 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 27 April 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-9383



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Andri Kogama, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-9383



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 35B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadeny S.E, M.Si., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-22028

I. PENDAPATAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu selalu berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan daerah terus-menerus mengalami peningkatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sumber penerimaan lainnya sehingga dengan naiknya anggaran pendapatan pasti mempunyai korelasi dengan anggaran belanja daerah yang secara langsung akan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa rencana Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.1.213.456.698.368,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berikut ini kami sajikan Struktur Anggaran Pendapatan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Untuk Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp.153.384.940.950,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

1) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.743.250.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp.3.861.479.355,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.91.282.961.595,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

2. PENDAPATAN TRANSFER

Untuk Pendapatan Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.060.071.757.418,00 (satu triliun enam puluh miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.978.071.757.418,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).

2) Pendapatan Teransfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah).

II. BELANJA

Secara keseluruhan Anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.261.088.243.237,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Operasi telah memperhatikan prinsip Penghematan dengan mengharapkan tersedia dana yang memadai untuk belanja pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Adapun Anggaran Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp.936.898.037.263,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berikut ini kami sajikan Struktur Belanja Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.553.340.095.972,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.339.225.274.291,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.193.572.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

4) Belanja Hibah

Anggaran Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.41.490.694.400,00 (empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

5) Belanja Bantuan Sosial

Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.648.400.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

2. BELANJA MODAL

Adapun Rencana Anggaran Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.132.087.242.458,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan Struktur Belanja Modal sebagai berikut:

1) Belanja modal tanah

Untuk Belanja Modal Tanah pada Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.708.604.605,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

2) Belanja modal peralatan dan mesin

Untuk Belanja Modal Peralatan Mesin Pada Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.23.175.168.782,00 (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

3) Belanja modal gedung dan bangunan

Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.22.732.266.500,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.80.108.965.939,00 (delapan puluh miliar seratus delapan juta

Sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

5) Belanja modal aset tetap lainnya

Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.362.236.632,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) .

3. BELANJA TAK TERDUGA

1) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

III. BELANJA TRANSFER

Untuk Rencana Belanja Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.188.852.963.516,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Untuk Transfer Bagi hasil Pendapatan Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.774.325.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Belanja Bantuan Keuangan

Untuk Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.183.078.638.516,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ratus ribu lima ratus enam belas rupiah).

IV. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.50.131.544.869,00 (lima puluh miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Penyertaan Modal Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari uraian diatas bila membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terdapat pembiayaan Neto sebesar Rp.47.631.544.869,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp.47.631.544.869,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), maka pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan sebesar Rp 0 (nol rupiah).



BAB IV INOVASI DAERAH

4.1 INOVASI DAERAH



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/582 /KPTS/B.01/2023

TENTANG

NAMA-NAMA KEGIATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilakukan penilaian terhadap laporan Indeks Inovasi Daerah tersebut;
 - b. bahwa dalam pelaporan inovasi daerah dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati yang memuat Nama-Nama kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga;
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Inovasi Daerah yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi :
- a. Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Pelayanan Publik; dan
 - c. Inovasi bentuk lainnya.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Penjabat Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Desember 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : B/ 502 /KPTS/B.01/2023
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA-NAMA KEGIATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
 TAHUN 2023

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
1.	TEMAN GELIS (Sistem Kenaikan Gaji Berkala Otomatis)	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu
2.	ELKAPRI (e-Laporan Kinerja Kabupaten Pringsewu)	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu
3.	SIK (Sistem Informasi Kepegawaian)	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu
4.	PELITA (Strategi Peningkatan Layanan melalui Pelayanan Kepegawaian Berbasis Digital)	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu
5.	SIDOMASPAR (Sistem Informasi Data Ormas dan Partai)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu
6.	Saung Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu
7.	PAK RADEN GERCEP (Pusat Informasi Koordinasi Deteksi Dini dan Gerak Cepat menangani ATHG)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pringsewu
8.	ODONK 114 (Operasi Darurat Non-Kebakaran)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu
9.	SURPASS 1000 (Survei Kepuasan Masyarakat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu
10.	TAPUK RAHWANA (Pendataan Penduduk Rentan Di Wilayah Rawan Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu
11.	Implementasi E Pajak Pringsewu	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
12.	Monitoring Pengawasan Pajak Reklame Berbasis Online	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
13.	Penerapan Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah BALAPAN (Bayakh Anjakh Lamban Daerah Pindai Aman Dan Nyaman Berbasis QRIS)	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
14.	Transaksi Non Tunai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu
15.	Sewu inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
16.	KOMPAS IPTEK KABUPATEN PRINGSEWU (KOMPetisi karyA inovaSi dan IPTEK KABUPATEN PRINGSEWU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
17.	WORKING (WORKshop Kelitbangan dan INovasi prinGsewu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18.	SIBAMBU (Sistem Berbasis Monitoring Pembangunan)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
19.	FAKTUAL (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
20.	KONDUKSI (Kolaborasi antar Stakeholder untuk Peningkatan Inovasi)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu
21.	POPKAB (Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Pringsewu)	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
22.	SEWUATI (Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
23.	SENDIRI LAGI (Setelah Sidang dapat Identitas Diri Langsung Memiliki KK masing-masing)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
24.	TAK SENDIRI LAGI (Tertib Administrasi Kependudukan Setelah Nikah dapat Identitas Diri langsung bagi keluarga inti)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
25.	MASBASKO (Masyarakat Bapak Asuh Stunting dan Keluarga Beresiko)	Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
26.	KENA PIKAT (Kegiatan Pemberian Paket Ikan Air Tawar)	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
27.	KETANCAB (Kegiatan Tanam Cabai)	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
28.	RAPEMDA (Radio Pemerintah Daerah)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu
29.	FASVIDCON (Fasilitas Video Conference)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu
30.	PEKON MEKAB (Pengelolaan Konten Media Kabupaten)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu
31.	SIKASN (Sistem Informasi Kinerja ASN/ E-Presensi)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu
32.	Bazar Syariah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
33.	Pelatihan Pengembangan Desain Produk Kerajinan Bambu	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
34.	Klinik UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
35.	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk dan Digital Marketing Bagi Para Perajin Tapis	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
36.	PROKASIH (Pengelolaan Program Kali Bersih)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu
37.	Pengolahan Sampah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu
38.	GRAPISA (Gerakan Pringsewu Sedekah Sampah Jumat)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
39.	Layanan Lumput Tinja Terjadwal (L2T2) berbasis Google Kalender	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
40.	SIMASJEK (Sistem Informasi Jasa Konstruksi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
41.	SIMANIS RIANG (Sistem Informasi Layanan Teknis Perijinan Bangunan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
42.	E-VOTING	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Pringsewu
43.	Kelompok Belajar Smart Village	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Pringsewu
44.	Transaksi Non Tunai di Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Pringsewu
45.	Sekolah Ramah Anak Bersahaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
46.	Kabupaten Layak Anak Bersahaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
47.	Generasi Berencana Bersahaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
48.	Kemudahan Berusaha (Sistem Pelayanan perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi secara elektronik)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
49.	PACAR INVESTOR (Pameran Cari Investor)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
50.	TERASI PATEN (Tarik Peluang Investasi Menggunakan Peta Potensi)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
51.	PERSAMI (Pelayanan Perizinan Sabtu dan Minggu)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
52.	DILAN PANDIKAR (Optimalisasi Pelayanan Mutasi Siswa SMP Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik pada Bidang Pendidikan Dasar)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
53.	Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Layanan Publik Berbasis Website pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu (Optimalisasi Pemanfaatan Website)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
54.	Peningkatan Kapasitas Guru SD Melalui Pemberdayaan KKG pada Tingkat Kecamatan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
55.	SI PAJU (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum)	Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu
56.	FORMALIN (Forum Komunikasi Lalu Lintas)	Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu
57.	SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini)	Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu
58.	BANG DIKUPANG (Pengembangan Budidaya Ikan Hias Cupang)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
59.	KELATIN (Keripik Kulit Patin)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
60.	PEMPEK PELANGI (Pengolahan Pempek Pelangi Berbahan Buah dan Sayur)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
61.	GEMESKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan Sehat)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
62.	RUMDESKAN (Rumah Desa Ikan)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
63.	LEGOMKAN (Legalitas Kelompok Perikanan/ Kelompok Perikanan Sadar Hukum)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
64.	BLUE LELE (Pemanfaatan Olahhan Ikan tanpa Limbah, Usaha Berkelanjutan, Jangka Panjang, dan Ramah Lingkungan)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
65.	BULE TERPENTING (Budidaya Ikan Lele di Kolam Terpal untuk Intervensi Penurunan Stunting)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
66.	E-IKAN CERDAS (Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Secara On Line)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
67.	GERBANG IKAN DESA (Gerakan membangun Perikanan Menuju Kemandirian Masyarakat Berbasis Desa)	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
68.	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu
69.	Peningkatan Keterampilan Bercerita (Peri Cerita)	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu
70.	Perpustakaan 3 in 1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu
71.	SIPAKAN (Sistem Pengawetan Hijauan Pakan Ternak)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
72.	Lomba Kelas Kebun Kakao	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
73.	Pasar Tani	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
74.	Bantuan Kebutuhan Dasar	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
75.	Pelatihan Membatik Bagi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
76.	RUTILAHU (Bantuan Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
77.	SLRT Bersahaja (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu
78.	Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
79.	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
80.	Pelatihan Digital Marketing	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
81.	Pelaksanaan Implementasi Kapabilitas APIP	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
82.	Pelaksanaan Kegiatan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
83.	RABULTUKON (Rapat Bulanan Turun Pekon)	Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
84.	BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting)	Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
85.	SAKO SAKU (Satu Pekon Satu Keunggulan)	Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
86.	SEKURA (Selamatkan Kebudayaan Nusantara)	Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
87.	One Stop Service Pekon Sinar Mulya	Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
88.	KULUBAN (Kuliner Khusus Banyumas)	Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
89.	LAPOR BABE (Layanan Aadministrasi Perizinan dan Non Perijinan Berbasis WEB)	Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
90.	LUSENTA (Lugusari Senja Wisata)	Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
91.	GELORA PKH (Gebyar Olimpiada dan Olahraga Program Keluarga Harapan)	Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
92.	KOMPAS NAWASENA Panutan Kec. Pagelaran	Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
93.	CANGKON (Camat Ngantor di Pekon)	Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
94.	RCL (Respon Cepat Linmas)	Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
95.	Fasilitasi UMKM	Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
96.	MASIF (Administrasi Surat Menyurat Secara Digital)	Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu
97.	Pelayanan PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah)	Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
98.	BERANTAS (Bergandengan Tangan Atasi) Kendala di Kelurahan	Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
99.	CAKEP (Camat Kerja di Pekon se-Kecamatan Pringsewu)	Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
100.	SESAMA JUMPA (Senam Bersama Jumat Pagi)	Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
101.	APUS (Apel Pekon Sukses)	Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
102.	Bincang Sehat Live Instagram	Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu
103.	Patroli Wilyah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu
104.	Peningkatan Kapasitas SATPOLPP dan LINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu
105.	SIMLINMAS (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu
106.	Optimalisasi Target Penyerapan Anggaran	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
107.	Si PEHAPE (Sistem Pengendalian Hasil Pembangunan)	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
108.	Hasil Survey Kepuasan Layanan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
109.	Sielda (Sistem Informasi Legal Drafting)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
110.	Pembinaan Penerapan Sekolah/ Madarasah Sehat melalui UKS/M Kabupaten Pringsewu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
111.	e-SAKIP Kabupaten Pringsewu	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
112.	Bimbingan Teknis Katalog Elektronik Lokal	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu/
113.	Bimbingan Teknis SPSE 4.5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
114.	Bimbingan Teknis Ekatalog Lokal	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
115.	Simpanan Pelajar	Bagian Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
116.	Memanfaatkan Kotoran Hewan Menjadi Biogas	Bagian Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
117.	Pengembangan Pembayaran Air PDAM Way Sekampung di segala chanel PPD melalui Q-Ris	Bagian Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
118.	WEB-GIS Way Sekampung (Penataan Jaringan Perpipaan dan Pelanggan yang tergabung dalam Q-GIS ke dalam Web GIS PDAM Way Sekampung)	Bagian Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
119.	SIKOP (Sistem Komunikasi Pimpinan)	Bagian Protokol dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
120.	Pengumpulan Data Dokumen LPPD	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
121.	Suara Dewan	Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu
122.	Dewan Menyapa	Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu
123.	SIAP BAPER	Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu
124.	DAMBA (Daur Ulang Limbah Domba)	UPT SMP Negeri 1 Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
125.	Sampah Plastik Menjadi Nilai Jual	UPT SMP Negeri 1 Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
126.	Mengolah Sampah Menjadi Pupuk Organik	UPT SMP Negeri 1 Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
127.	SIRSAK TAPE IKAN PETAN (Siring Sekolah Sebagai Tempat Pemeliharaan Ikan Dan Penyiraman Tanaman)	UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
128.	RATU MELISA KARISMATIK	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
129.	WIRANATA (Wirausaha Ikan Air Tawar) berbasis potensi lokal UPT SMP Negeri 1 Pagelaran	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
130.	Pemanfaatan Sampah Organik menjadi Kompos	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
131.	CALIPANTA (California Papaya Pantura; Membangun karakter profil pelajar pancasila melalui inovasi kewirausahaan)	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

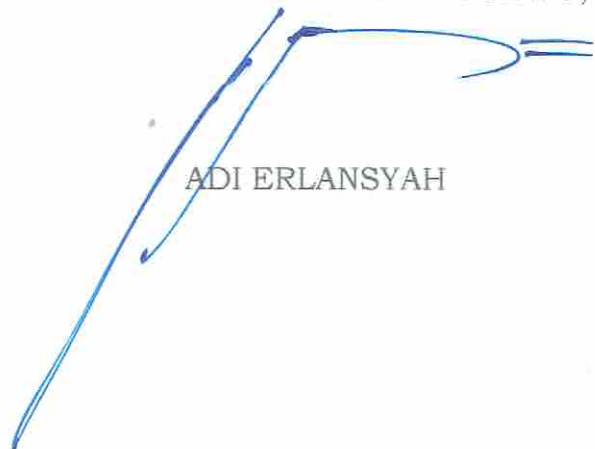
NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
132.	Menyulam pembelajaran yang Memukau dengan Canva	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
133.	Mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dengan genially	UPT SMP Negeri 1 Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
134.	Persoalan Limbah Di Sekolah (OLI DI SEL)	UPT SMP Negeri 1 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
135.	Simbah Orcozy (Sabun Limbah Organik Eco Enzyme)	UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
136.	Implementasi Teknologi KIBAR (Kartu Interaktif 3D Berbasis Andriod dengan Augmented Reality)	UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
137.	Implementasi Teknologi Augmented Reality (AR) dalam Sains Berbasis Android dengan Kartu Interaktif (Siger Saibatin)	UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
138.	KRIPIK PISANG (Kreasi Inovatif Dan Pembelajaran Asik dengan Who Am I Application berbahasa Inggris)	UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
139.	Gerakan piket Zonasi dalam Upaya Menciptakan Sekolah Berkumandang menuju Adiwiyata	UPT SMP Negeri 2 Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
140.	Penerapan Metode Praktik dan Penugasan terstruktur Aktivitas Pembuatan Pupuk Kompos dan Cair	UPT SMP Negeri 2 Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
141.	Budidaya Pembibitan Tanaman Sayuran dengan Menggunakan media Daun (Pengganti Polybag Plastik)	UPT SMP Negeri 2 Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
142.	Kerja Bakti Sekolah Sebagai Budaya Positif	UPT SMP Negeri 2 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
143.	Pengelolaan Sampah Organik dan Onorganik	UPT SMP Negeri 2 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
144.	Pengembangan Taman Apotik Hidup	UPT SMP Negeri 2 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
145.	BUDAYA POSITIF APEL PAGI Expresi positif "EXPOST"	UPT SMP Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
146.	Implementasi Kurikulum Merdeka Dengan Model Star di UPT SMP Negeri 2 Pringsewu	UPT SMP Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
147.	GALIPOSTAL (Gerakan Literasi Poster Digital) UPT SMP Negeri 3 Gadingrejo	UPT SMP Negeri 3 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
148.	RUTUSIS (Rumah Tugas Siswa) Website Belajar Online UPT SMP Negeri 3 Gadingrejo	UPT SMP Negeri 3 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
149.	Alisa Spenta (Aksi Lihat Sampah Simpan Pada Tempatnya UPT SMP Negeri 3 Pringsewu)	UPT SMP Negeri 3 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
150.	Jumpa Berkah Spenta (Jumat Pagi Bertaqwa Infaq dan Sedekah UPT SMP Negeri 3 Pringsewu)	UPT SMP Negeri 3 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
151.	Gema Spenta Gerakan Menabung Siswa UPT SMP Negeri 3 Pringsewu)	UPT SMP Negeri 3 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
152.	Pemanfaatan Limbah Lingkungan Sekitar Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Keberlanjutan Kehidupan	UPT SMP Negeri 4 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
153.	Seni Bereligi	UPT SMP Negeri 4 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
154.	JAGUWAR (Jajan Menggunakan Wadah dari Rumah) Dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Adiwiyata Nasional	UPT SMP Negeri 4 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
155.	Membangun karakter Enterpreneur dengan Metan Hidroponik	UPT SMP Negeri 4 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
156.	LICAN (Limbah Cantik) Teknologi olah limbah handuk bekas menjadi pot cantik	UPT SMP Negeri 5 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
157.	ECOPRINT (Teknologi cetak daun ramah lingkungan)	UPT SMP Negeri 5 Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
158.	Pelestarian Makanan Lokal Indonesia Berbahan Pisang	UPT SMP Negeri Satu Atap Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
159.	Budidaya Tanaman Holtikultura	UPT SMP Negeri Satu Atap Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
160.	Pembuatan Kompos Organik	UPT SMP Negeri Satu Atap Pagelaran Utara Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
161.	KRU SEHAT (Kelas Rumpi Sehat)	UPTD Puskesmas Adiluwih Kabupaten Pringsewu
162.	NAGA SEJIWA (Pekon Siaga Sehat Jiwa)	UPTD Puskesmas Adiluwih Kabupaten Pringsewu
163.	GEMAKLUR SERI (Gerakan Makan Telur Setiap Hari)	UPTD Puskesmas Ambarawa Kabupaten Pringsewu
164.	GAREM ASIN (Germas Remaja Sebagai Aksi Cegah Stunting)	UPTD Puskesmas Bandung Baru Kabupaten Pringsewu
165.	GEPUK CETING (Gerakan Pemanfaatan Pangan Lokal Ikan untuk Pencegahan Stunting)	UPTD Puskesmas Banyumas Kabupaten Pringsewu
166.	UKGS Inovatif	UPTD Puskesmas Bumiratu Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA KEGIATAN/INOVASI	INSTANSI
167.	SIGIAT PAPArazi (Aksi Giat Pencegahan dan Perbaikan Gizi)	UPTD Puskesmas Fajar Mulya Kabupaten Pringsewu
168.	UPS MOBIL AA (USG PJB SHK Mobile untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi)	UPTD Puskesmas Fajar Mulya Kabupaten Pringsewu
169.	UMPAN UDANG (Untuk Mendapatkan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dilakukan USG dan ANC berkualitas dalam gedung)	UPTD Puskesmas Fajar Mulya Kabupaten Pringsewu
170.	GERTAK P45 TABSIDA (Gerakan Serentak Pilar 4 dan 5 dengan Tabung Sisa Dapur)	UPTD Puskesmas Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
171.	GEMINDU (Gerakan Mobile Posbindu)	UPTD Puskesmas Pagelaran Kabupaten Pringsewu
172.	PERUT KENCOT (Pemeriksaan Rutin Kadar Gula, Tekanan Darah, Kolesterol dan Asam Urat)	UPTD Puskesmas Pardasuka Kabupaten Pringsewu
173.	Perawatan Luka Modern	UPTD Puskesmas Pringsewu Kabupaten Pringsewu
174.	SUSTER SEKSI (Sukses Terintegrasi Bersama Lintas Sektor Puskesmas Rejosari)	UPTD Puskesmas Rejosari Kabupaten Pringsewu
175.	BATAKO (Bahagia Tanpa Rokok)	UPTD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
176.	TANTE JELIKA (Target Tercapai Jemput Dahak Libatkan Kader)	UPTD Puskesmas Wates Kabupaten Pringsewu

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

BAB V

PENUTUP

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 3 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah Informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

RLPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada masyarakat melalui media, papan pengumuman dan website resmi pemerintah daerah. Sedangkan, secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. RLPPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 menyajikan ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, capaian kinerja makro dan urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan inovasi daerah.

Berbagai permasalahan ditemukan dalam proses dan tahapan penyusunan RLPPD. Permasalahan tersebut tidak lain disebabkan oleh berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sumber daya dan lambatnya data informasi yang valid sesuai sistematika dan menunggu selesainya LPPD Kabupaten. Namun yang harus dilakukan untuk perbaikan kualitas informasi adalah perbaikan dokumen yang mampu menyajikan informasi dengan baik kepada masyarakat ke depannya.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu berperan aktif dalam penyusunan RLPPD dan kepada semua pihak yang juga berperan mengisi pembangunan Kabupaten Pringsewu di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan kesejahteraan bersama.

PRINGSEWU

PRINGSEWU

JAYA SECANGANAN

